

# STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA KUSU LOVRA KECAMATAN KAO KABUPATEN HALMAHERA UTARA

*(Empowerment Strategy for Fisherman Communities in Kusu Lovra Villagae of  
Kao Subdistrict of North Halmahera District).*

John Raimand Pattiasina<sup>1</sup>, Mulyono S Baskoro<sup>2</sup>, Budhi H. Iskandar<sup>2</sup>

## *Abstract*

*The aims of this research are: 1) To identify socio-economic conditions of fisherman communities in the village of Kusu lovra; 2) To know how the fisheries business sector able to fill out the fishermen family life needs in the village of Kusu lovra; 3) To determine what factors impede successful community empowerment programs Kusu lovra fishing village; and 4) To formulate the strategy of community empowerment Kusu lovra fishing village, and determine priority community development programs. Research method used is the case study method. And than analysis by using descriptive analysis, SWOT analysis, and Analysis Hierarchy Process (AHP). The results showed that the fisherman in Kusu Lovra village divided into two group are katinting fishermen (owner) and katinting labors fishermen. Average income from the agricultural sector is around 300,000, - to Rp.500,000, - per harvested from an area of one to two hectares. While the income of owner and labors from fishing business is an average of Rp2,450,000, - per month. Dominant internal factor as a barrier to community empowerment programs in Kusu Lovra Village such as skills and mastery of technology is still less with a weight value 0,585. While the dominant external factor as a barrier to empowerment program is marine ecosystem damage caused by destructive fishing weights with a value 0.600. Empowerment strategy for fisherman communities in Kusu Lovra Village such as 1) increasing the productivity of fishermen with 0.714 weight value; 2) increasing the role of local institutions with total weight of 0.143 and 3) the conservation of fishery resources with a value of 0.143 weight.*

*Keywords: strategy, empowerment, fisherman.*

---

<sup>1</sup>Lulusan program magister sains Mayor Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap, Sekolah Pasacasarjana IPB

<sup>2</sup>Dosen Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

# **1 PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Masyarakat nelayan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Pada umumnya mereka adalah kelompok masyarakat tertinggal yang berada pada level paling bawah, baik tertinggal secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Karena penghasilan mereka masih tergantung pada kondisi alam, maka sulit bagi mereka untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Sebagai nelayan tradisional bukan saja berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang panjang, tetapi mereka juga dihadapkan manajemen pengelolaan keuangan dan pemasaran hasil produksinya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk berusaha meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, baik melalui pemberian bantuan peralatan tangkap, kemudahan akses permodalan, maupun melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir. Dimana semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan. Akan tetapi tidak semua program tersebut tepat sasaran dan hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat program pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kusu Lovra, serta untuk merumuskan kembali strategi kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kusu Lovra. Dimana sebagian besar dari mereka termasuk nelayan tradisional dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di Desa Kusu Lovra; 2) menentukan sejauh mana usaha di sektor perikanan mampu menopang pemenuhan kebutuhan hidup keluarga nelayan di Desa Kusu Lovra; 3) menentukan faktor-faktor yang menghambat program pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra, dan 4) menyusun strategi pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra, serta menentukan prioritas program pengembangan masyarakat.

## **2 METODE PENELITIAN**

### **2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 7 bulan yang dimulai dari studi literatur, pembuatan proposal, pengumpulan data dan penyusunan laporan. Penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan Desember 2009 sampai dengan Juni 2010. Penelitian ini dilakukan di Desa Kusu Lovra, Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

### **2.2 Metode Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Studi kasus adalah studi intensif dan terperinci mengenai suatu objek yang dilakukan dengan berpedoman pada kuesioner (Soekartawi 1986).

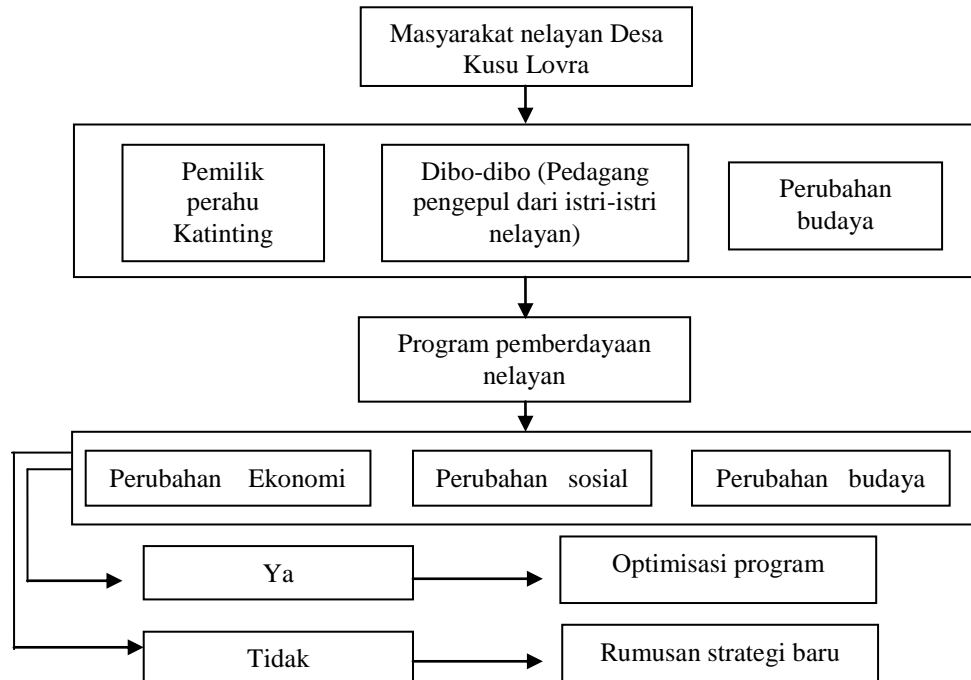
- 1) Analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan melalui pembuatan tabel-tabel, informasi, gambar-gambar, grafik beserta angka-angka yang tersedia kemudian melakukan perbandingan, penafsiran, menarik kesimpulan dari hasil analisis. Hal ini mengandung pengertian bahwa data yang terkumpul baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan penguraian dan perbandingan dalam bentuk kalimat atau kata-kata untuk ditarik kesimpulan.
- 2) Analisis SWOT adalah identifikasi secara sistematis atas kekuatan dan kelemahan dari faktor-faktor eksternal yang dihadapi suatu sektor. Analisis ini digunakan untuk memperoleh hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal. Dengan analisis ini, kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), yang merupakan faktor internal dapat diidentifikasi, begitu pula peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang merupakan faktor eksternal.
- 3) Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan SWOT, maka langkah selanjutnya adalah membuat urutan prioritas program dengan menggunakan *Analysis Hierarchy Proses (AHP)*.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru

pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers 1995). Kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Kusu Lovra kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara, maka hal penting yang perlu diberdayakan adalah faktor pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat nelayan itu sendiri untuk mendorong peningkatan pendapatan mereka.

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara memiliki wilayah laut yang cukup luas, hal ini menjadikan salah satu potensi ekonomi yang cukup besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi permasalahan klasik masih saja terjadi yaitu rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, penguasaan teknologi yang masih rendah, maupun ketertinggalan. Semua ini bermuara pada ketertinggalan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Akan tetapi, program pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah dilakukan, belum mampu merubah kondisi tersebut secara signifikan. Sehingga diperlukan evaluasi dan rekonstruksi strategi pemberdayaan masyarakat nelayan yang lebih efektif dan efisien.



Gambar 1 Kerangka pemikiran

### 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

Luas perairan Halmahera Utara adalah 19.536,02 Km<sup>2</sup> atau 76% dari luas wilayah keseluruhan, mengandung berbagai sumberdaya perikanan yang bernilai ekonomis penting. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Utara *standing stock* perikanan sebesar 89.865,69 ton/tahun, potensi lestari *Maximum Sustainable Yield* (MSY) yang dapat dimanfaatkan setiap tahun diperkirakan sebesar 26.946,41 ton/tahun dengan perincian perikanan pelagis 17.986,44 ton/tahun, perikanan demersal 71.879,25 ton/tahun. Perikanan laut di Kabupaten Halmahera Utara merupakan daerah sebaran jenis ikan pelagis dan demersial yang mempunyai nilai ekonomis penting. (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Utara, 2008).

Dengan kekayaan sumberdaya ikan di Kabupaten Halmahera Utara tersebut masyarakat di Desa Kusu Lovra banyak yang beralih profesi menjadi nelayan. Bisa dibandingkan pendapatan nelayan dari hasil melaut, lebih besar daripada hasil pertanian di kebun kelapanya. Pendapatan kotor nelayan dari hasil melaut sebesar Rp100.000-150.000 per hari. Setelah pendapatan tersebut dikurangi dengan total biaya operasional, sisanya kemudian dibagi dua antara pemilik perahu dengan buruh nelayan. Rata-rata biaya operasional per hari untuk nelayan katinting adalah Rp41.000. sehingga rata-rata pendapatan bersih untuk nelayan maupun untuk buruh nelayan perhari sebesar kurang lebih Rp42.000. Begitu juga pendapatan untuk buruh nelayan. Jika diasumsikan (berdasarkan pengalaman nelayan Desa Kusu Lovra) bahwa penangkapan efektif 14 hari dalam sebulan, maka rata-rata pendapatan nelayan adalah sebesar Rp588.000 per bulan. Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara tahun 2008 sebesar Rp700.000 per bulan pada tahun 2009 naik sebesar 10% menjadi Rp770.000 per bulan.

Tingkat pendidikan merupakan suatu gambaran secara umum untuk melihat kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra. Menurut Dahuri (2000), pada umumnya masyarakat pesisir lebih merupakan masyarakat tradisional dengan kondisi sosial ekonomi rendah dan relatif

sederhana. Pendidikan formal yang diterima masyarakat pesisir secara umum jauh lebih rendah dari pendidikan masyarakat non pantai lainnya. Berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat, Rahardjo (1996) menyatakan bahwa masyarakat pesisir dapat dibedakan secara jelas dari masyarakat kota, perbedaan utamanya karena keadaan sosial ekonomi mereka yang umumnya terbelakang. Seperti terlihat dari beberapa indikator, misalnya pendapatan yang relatif rendah, kurangnya kelembagaan penunjang, lemahnya infrastruktur (sosial, fisik, ekonomi), rendahnya tingkat pendidikan dan status kesehatan.

Menurut Boeke dalam Mintaroem (2008), masyarakat desa tradisional mampu membangun dan mengembangkan struktur ekonomi secara otonom dan swasembada, hal itu tidak lain karena didukung penuh oleh adanya ikatan-ikatan sosial dan budaya yang asli dan organis, sistem kesukuan tradisional, kebutuhan-kebutuhan yang tak terbatas dan bersahaja, prinsip produksi pertanian yang semata-mata untuk keperluan keluarga pengejang pertukaran sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan, serta tidak terlalu didasarkan pada motif-motif murni ekonomi yang sangat berorientasi kepada pasar dan laba (*non profit oriented*). Sehubungan dengan hal itu maka pekerjaan tidak lain dipandang sebagai “sarana pengabdian” terhadap kewajiban-kewajiban moral, sosial, etika dan keagamaan; atau hanya sebatas sebagai upaya untuk mempertahankan hidup. Dengan kata lain, setiap aktivitas ekonomi, apapun bentuk dan jenisnya, ia senantiasa dikuasai atau berada di dalam “konteks tradisi”.

Konsep pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan secara umum akan dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal, yang dapat menentukan tingkat keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk lingkungan internal secara sinergis akan menentukan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*), kemudian lingkungan eksternal secara sinergis akan menentukan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang akan dihadapi masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra.

Hasil analisis situasi dengan pendekatan secara komprehensif dari berbagai aspek yang berpengaruh penting terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara, dapat diidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan

eksternal strategis (peluang dan ancaman), berdasarkan hasil survei, diketahui kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman dari lingkungan masyarakat nelayan sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.

Tabel 1 Matrik evaluasi faktor internal dan eksternal

Faktor Internal	<b>Kekuatan:</b> 1. Potensi sumberdaya perikanan tangkap yang besar 2. Semangat kerja tinggi 3. Tegar dalam menghadapi kesulitan hidup	<b>Kelemahan:</b> 1. Keterampilan dan penguasaan teknologi masih kurang 2. Jiwa <i>entrepreneur</i> rendah 3. Tingkat pendidikan rata-rata rendah 4. Posisi tawar terhadap pedagang pengepul rendah
Faktor Eksternal	<b>Peluang:</b> 1. Permintaan hasil produksi ikan tinggi 2. Tersedianya fasilitas kredit bagi nelayan 3. Lokasi penangkapan ( <i>fishing ground</i> ) dekat dan luas 4. Tenaga kerja murah 5. Kualitas perairan yang cukup baik	<b>Ancaman:</b> 1. Kerusakan ekosistem laut akibat penangkapan destruktif 2. Harga pasar ditentukan oleh pihak pengepul 3. Harga BBM tinggi 4. Penangkapan ikan tergantung musim 5. Hasil produksi berfluktuasi

Perumusan strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dengan berdasarkan pada faktor-faktor lingkungan strategis. Alternatif-alternatif strategi yang merupakan rumusan rencana strategi (renstra) pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan Desa Kusu Lovra, hasil *generating* dari matriks SWOT disampaikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara

<b>S T R A T E G I</b>	<b>SO</b>	<b>WO</b>
	1. Sosialisasi fasilitas kredit yang lebih intensif terhadap nelayan 2. Intervensi pasar (membuka peluang pasar) oleh pemerintah dan instansi terkait.	1. Pengenalan teknologi tepat guna kepada nelayan 2. Pengembangan diversifikasi usaha pengolahan ikan
	<b>ST</b>	<b>WT</b>
	1. Mengintensifkan pengalaman laut oleh aparat keamanan 2. Deregulasi distribusi BBM khusus untuk nelayan	1. Subsidi harga BBM bagi nelayan 2. Regulasi untuk mencegah penangkapan ikan destruktif melalui aturan adat

Hasil analisis strategi pemberdayaan masyarakat nelayan, dapat terumuskan strategi pemberdayaan masyarakat nelayan. Kemudian dirumuskan beberapa program strategis untuk penanggulangan kemiskinan, yaitu 1) peningkatan peran kelambagaan; 2) peningkatan produktivitas nelayan; 3) konservasi sumberdaya ikan.

Rancangan program strategi ini kemudian dibuatkan matriks berganda yang mengacu pada tabel skala angka dan kemudian direspon oleh responden. Hasil penilaian masing-masing *stakeholder* ternyata memiliki pilihan prioritas program yang berbeda, seperti prioritas program dari pemerintah berbeda dengan prioritas program dari LSM maupun dari akademisi. Begitu juga sebaliknya, antara LSM dengan akademisi maupun pemerintah memiliki prioritas program yang berbeda, (Saaty, 1993)

Setelah dilakukan analisis dengan A'WOT hasilnya menunjukkan bahwa komponen peningkatan produktivitas nelayan memiliki nilai bobot paling tinggi dalam pemilihan alternatif program strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kusu Lovra, kemudian diikuti oleh program peningkatan peran kelembagaan lokal dan konservasi sumberdaya ikan di sekitar perairan Teluk Kao dengan nilai bobot yang sama.

Maksud utama dari penyusunan rencana strategi penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan di desa Kusu Lovra adalah untuk menggagas strategi utama dan program kerja yang perlu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Kusu Lovra. Hal ini juga dapat memberikan arahan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra.

Argumentasi utama dalam merumuskan rencana strategi ini, didasarkan pada kenyataan bahwa Kabupaten Halmahera Utara memiliki sumberdaya pesisir dan laut yang cukup besar. Salah satu kunci keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra adalah partisipasi aktif dan dukungan penuh dari semua *stakeholders* yang sumber kehidupannya secara langsung bergantung pada hasil laut. Nelayan Desa Kusu Lovra adalah partisipasi aktif dan dukungan penuh dari semua *stakeholders* yang sumber kehidupannya secara langsung



bergantung pada hasil laut. Rencana kegiatan berdasarkan bobot dan prioritas program pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra seperti disajikan pada Tabel 3.

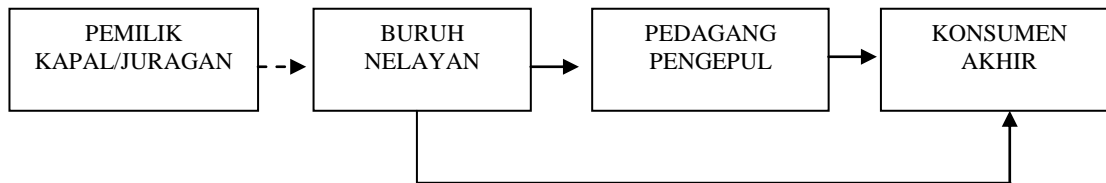
Tabel 3 Rencana kegiatan berdasarkan bobot dan prioritas program pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra

Program	Kegiatan	Bobot	Prioritas
Peningkatan Produktivitas Nelayan	1. Memfasilitasi kredit kepemilikan kapal bagi buruh nelayan	0,738	P1
	2. Membuka tabungan khusus untuk buruh nelayan	0,170	P2
	3. Mendorong peran lembaga keuangan mikro dan koperasi	0,092	P3
Peningkatan Peran Kelembagaan Lokal	1. Membentuk kelompok usaha bersama bagi istri nelayan dan pendampingnya	0,167	P2
	2. Memberikan pelatihan diversifikasi usaha pengolahan ikan	0,833	P1
Konservasi Sumberdaya Ikan	1. Pembangunan pos	0,481	P1
	2. Melakukan patrol rutin	0,103	P4
	3. Menambahkan armada patrol pengamatan laut	0,297	P2
	4. Malarang penangkapan ikan dengan bahan peledak	0,119	P3

### 3.2 Pembahasan

#### (1) Sosial Ekonomi Nelayan

Kehidupan para nelayan Desa Kusu Lovra bukanlah bersifat individual, tetapi dalam melaksanakan pekerjaan sebagai nelayan, sebagian dari mereka ada yang hidup berkelompok. Setiap kelompok nelayan terdiri dari 1) juragan pemilik kapal/perahu dan 2) buruh nelayan. Ketika melaut buruh nelayan juga terkadang ada yang sendiri dan ada juga yang lebih dari satu orang. Sebagai sebuah (organisasi) kelompok nelayan, pola relasi kerja, baik antara juragan/pemilik perahu dan buruh nelayan sendiri, bukan terjadi dalam kerangka hubungan kerja antara “atasan” dan “bawahan” yang bersifat “hubungan pengabdian”, tetapi lebih bersifat “kolegialisme” dan “kekeluargaan”, sekalipun terdapat klasifikasi di antara mereka sesuai dengan spesifikasi kerja masing-masing. Hubungan kerja di antara mereka pun sangat longgar, terbuka, suka-hati dan didasarkan atas kerjasama yang saling menguntungkan. Hal ini menunjukkan betapa faktor-faktor sosial dan budaya bercampur baur dengan faktor-faktor ekonomi.



Gambar 2 Pelaku ekonomi di Desa Kusu Lovra

Berdasarkan Gambar 2 di atas terlihat bahwa sebagian nelayan yang tidak memiliki perahu, mereka membawa perahu milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Hasil tangkapan di bagi rata antara pemilik perahu dengan buruh nelayan, setelah dikurangi total biaya operasional. Biaya operasional dikeluarkan oleh buruh nelayan sepenuhnya, sedangkan pemilik perahu hanya bermodalkan perahu saja. Disini terlihat hubungan antara pemilik perahu dengan buruh nelayan seperti hubungan atasan dan bawahan. Hubungan ini terjadi karena buruh nelayan tidak memiliki perahu sendiri, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengoperasikan perahu milik orang lain. Akibatnya, penghasilan yang diperoleh relatif lebih kecil dibanding jika perahu milik sendiri.

Hasil produksi masyarakat nelayan di desa Kusu Lovra sangat bergantung pada cuaca. Pada musim-musim tertentu, jumlah produksi bisa melimpah hingga tidak mampu diserap oleh pasar. Hal ini menyebabkan harga menjadi sangat rendah akibat panen melimpah. Tetapi ketika musim kemarau atau cuaca buruk, hasil produksi sangat kecil hingga hasil melaut tidak mampu menutupi biaya operasional.

## (2) Prioritas Strategi dan Penjabaran Program

Secara umum, dari semua komponen dalam faktor SWOT yang telah diidentifikasi, program strategi berdasarkan hasil *generating* dari matriks SWOT adalah sebagai berikut: (1) strategi SO (kekuatan-peluang) meliputi program sosialisasi fasilitas kredit yang lebih intensif terhadap nelayan dan program intervensi pasar (membuka peluang pasar) oleh pemerintah, (2) strategi WO (kelemahan-peluang) meliputi program pengenalan teknologi tepat guna kepada nelayan, dan program pengembangan diversifikasi usaha pengolahan ikan; (3) strategi ST (kekuatan-ancaman meliputi program pengintensifan pengamanan laut

oleh aparat keamanan, dan program deregulasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) khusus nelayan; (4) strategi WT (kelemahan-ancaman) meliputi program subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan dan program pembuatan regulasi untuk mencegah penangkapan ikan deskruktif melalui aturan adat.

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa komponen kekuatan (S) memiliki nilai bobot paling tinggi dalam penentuan strategi pemberdayaan masyarakat nelayan, kemudian diikuti oleh komponen peluang (O), kelemahan (W), dan ancaman (T). Bobot dan prioritas dari masing-masing komponen tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 Matrik prioritas komponen SWOT strategi pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara

<b>Faktor SWOT</b>	<b>Bobot</b>	<b>Prioritas</b>
Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	0,589	<b>P1</b>
Peluang ( <i>Oportunities</i> )	0,058	<b>P4</b>
Kelemahan ( <i>Weaknessess</i> )	0,098	<b>P3</b>
Ancaman ( <i>Threats</i> )	0,256	<b>P2</b>

Diolah dari hasil A'WOT

Tabel 4 menunjukkan bahwa faktor internal strategi pemberdayaan masyarakat nelayan didominasi oleh komponen kekuatan, sedangkan faktor eksternal yang dominan adalah komponen ancaman. Besarnya faktor kekuatan dan ancaman dibandingkan dengan kelemahan dan peluang dalam strategi pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan suatu indikator keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kusu Lovra.

Selanjutnya, dari komponen *strengths*, faktor-faktor yang menentukan dalam strategi pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra yaitu 1) semangat kekeluargaan tinggi; 2) semangat kerja yang tinggi; 3) tegar menghadapi kesulitan hidup. Bobot dan prioritas masing masing faktor disampaikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Matrik prioritas faktor kekuatan strategi pemberdayaan nelayan di Desa Kusu Lovra Kecamatan Kao

<b>Faktor Kekuatan</b>	<b>Bobot</b>	<b>Prioritas</b>
Semangat kekeluargaan tinggi	0,319	<b>P2</b>
Semangat kerja yang tinggi	0,460	<b>P1</b>
Tegar menghadapi kesulitan hidup	0,221	<b>P3</b>

Diolah dari hasil A'WOT

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor kekuatan tersebut, ternyata bahwa faktor semangat kerja yang tinggi merupakan faktor kekuatan utama dalam strategi pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra. Semangat kerja yang tinggi dalam mengelola potensi sumberdaya perairan merupakan modal utama yang sangat potensial untuk dikembangkan. Dengan demikian, faktor ini diharapkan dapat dimaksimalkan, melihat masih luasnya potensi yang tersedia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra dimasa yang akan datang. Sampai saat ini terbukti bahwa daerah Kabupaten Halmahera Utara merupakan daerah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan laut. Di samping itu, semangat kerja yang tinggi dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan hidup dari para nelayan merupakan faktor kekuatan yang juga penting untuk diperhatikan, karena merupakan daya dukung faktor kekuatan utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra.

Hasil analisis komponen kelemahan faktor-faktor yang menentukan dalam strategi pemberdayaan masyarakat Desa Kusu Lovra adalah 1) keterampilan dan penguasaan teknologi masih kurang; 2) jiwa *entrepreneur* rendah; 3) tingkat pendidikan rata-rata rendah; 4) posisi tawar terhadap pedagang pengepul rendah. Bobot dan prioritas dari masing-masing faktor dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Matrik prioritas faktor kelemahan strategi pemberdayaan nelayan di Desa Kusu Lovra Kecamatan Kao

<b>Faktor Kelemahan</b>	<b>Bobot</b>	<b>Prioritas</b>
Keterampilan dan penguasaan teknologi masih kurang	0,585	<b>P1</b>
Jiwa <i>entrepreneur</i> rendah	0,132	<b>P3</b>
Tingkat pendidikan rata-rata rendah	0,132	<b>P4</b>
Posisi tawar terhadap pedagang pengepul rendah	0,151	<b>P2</b>

Diolah dari hasil A'WOT

Berdasarkan hasil analisis peringkat faktor-faktor kelemahan di atas, ternyata bahwa 1) keterampilan dan penguasaan teknologi masih kurang; 2) jiwa

*entrepreneur* rendah; 3) tingkat pendidikan rata-rata rendah; 4) posisi tawar terhadap pedagang pengepul rendah merupakan faktor kelemahan yang mendasar dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kusu Lovra. Untuk itu perumusan strategi yang akan dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan perlu mempertimbangkan faktor ini agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Hasil analisis komponen peluang atau *oportunities*, faktor-faktor yang menentukan dalam strategi pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra yaitu 1) permintaan hasil produksi ikan tinggi; 2) tersedianya fasilitas kredit bagi nelayan; 3) lokasi penangkapan (*fishing ground*) dekat dan luas; 4) tenaga kerja murah dan 5) kualitas perairan yang cukup baik. Bobot dan prioritas dari masing-masing faktor disampaikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Matrik prioritas faktor peluang strategi pemberdayaan nelayan di Desa Kusu Lovra Kecamatan Kao

<b>Faktor Peluang</b>	<b>Bobot</b>	<b>Prioritas</b>
Permintaan hasil produksi ikan tinggi	0,047	<b>P5</b>
Tersedianya fasilitas kredit bagi nelayan	0,204	<b>P4</b>
Lokasi penangkapan ( <i>fishing ground</i> ) dekat dan luas	0,241	<b>P2</b>
Tenaga kerja murah	0,301	<b>P1</b>
Kualitas perairan yang cukup baik	0,206	<b>P3</b>

Diolah dari hasil A'WOT

Berdasarkan hasil analisis peringkat faktor-faktor peluang di atas, diketahui bahwa faktor tenaga kerja yang murah merupakan faktor yang paling penting untuk dioptimalkan, sebagai peluang pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra. Hal ini juga didukung oleh lokasi penangkapan (*fishing ground*) yang dekat dan luas merupakan peluang cukup penting untuk diperhatikan. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, menunjukkan bahwa komponen SWOT yang paling rendah bobotnya adalah adalah komponen peluang (*opportunity*).

Komponen *threats* faktor-faktor yang menentukan strategi pengembangan kelembagaan lumbung pangan masyarakat adalah 1) kerusakan ekosistem laut akibat penangkapan destruktif; 2) harga pasar ditentukan oleh pihak pengumpul; 3) harga BBM tinggi; 4) penangkapan ikan tergantung pada musim dan 5) hasil

produksi berfluktuasi. Bobot dan prioritas dari masing-masing faktor dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Matrik prioritas faktor ancaman strategi pemberdayaan nelayan di Desa Kusu Lovra Kecamatan Kao

<b>Faktor Ancaman</b>	<b>Bobot</b>	<b>Prioritas</b>
Kerusakan ekosistem laut akibat penangkapan destruktif	0,600	<b>P1</b>
Harga pasar ditentukan oleh pihak pengumpul	0,086	<b>P3</b>
Harga BBM tinggi	0,043	<b>P5</b>
Penangkapan ikan tergantung pada musim.	0,216	<b>P2</b>
Hasil produksi berfluktuasi	0,055	<b>P4</b>

Diolah dari hasil A'WOT

Berdasarkan hasil analisis peringkat faktor-faktor ancaman tersebut, Kerusakan ekosistem laut akibat penangkapan destruktif merupakan faktor ancaman yang serius dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kusu Lovra. Bobot faktor ini sangat tinggi (0,600) hal ini menunjukkan bahwa faktor ini diharapkan segera dapat diatasi dan diharapkan adanya suatu strategi yang akan dilaksanakan untuk dapat segera mengatasi masalah tersebut.

Secara umum, dari semua faktor SWOT yang telah diidentifikasi, faktor yang paling tinggi prioritasnya dalam strategi pemberdayaan masyarakat nelayan. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra berturut-turut adalah 1) peningkatan produktivitas nelayan; 2) peningkatan peran kelembagaan lokal dan 3) konservasi sumberdaya ikan.

Hasil analisis A'WOT menunjukkan bahwa komponen peningkatan produktivitas nelayan memiliki nilai bobot paling tinggi dalam pemilihan alternatif program pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kusu Lovra, kemudian diikuti oleh komponen peningkatan peran kelembagaan lokal, dan konservasi sumberdaya ikan di sekitar perairan Teluk Kao dengan nilai bobot yang sama. Bobot dan prioritas dari masing-masing komponen tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9, menunjukkan bahwa strategi peningkatan produktivitas nelayan merupakan prioritas utama yang harus diprioritaskan dengan nilai bobot 0,714, kemudian. Peningkatan peran kelembagaan lokal dengan nilai bobot 0,143 dan konservasi sumberdaya ikan dengan nilai bobot 0,143.

Tabel 9 Bobot dan prioritas strategi pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra Kabupaten Halmahera Utara

<b>Strategi</b>	<b>Bobot</b>	<b>Prioritas</b>
Peningkatan produktivitas nelayan	0,714	<b>P1</b>
Peningkatan peran kelembagaan lokal	0,143	<b>P2</b>
Konservasi sumberdaya ikan	0,143	<b>P3</b>

Diolah dari hasil A'WOT

### (3) Peningkatan Produktivitas Nelayan

Sumberdaya perikanan yang ada di Perairan Teluk Kao seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan disekitarnya termasuk nelayan di Desa Kusu Lovra. Hasil observasi lapangan dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat pendapatan nelayan, antara lain karena nelayan di Desa Kusu Lovra dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang masih tradisional dan skala kecil, selain itu pengetahuan keterampilan juga masih terbatas. Khusus untuk buruh nelayan, ditemukan bahwa mereka belum mampu membeli perahu dan peralatan tangkap sendiri. Salah satu penyebab adalah akses terhadap lembaga keuangan seperti bank sangat rendah padahal hampir sebagian besar kegiatan perikanan tangkap di Indonesia didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Charles, *et al* (2008) mengemukakan bahwa kegiatan perikanan Indonesia, hingga saat ini masih didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah, baik oleh nelayan penangkap maupun nelayan pengolah hasil tangkapan. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari statistik perikanan tahun 2006 yang menunjukkan bahwa dari 412.497 unit armada perikanan yang digunakan oleh seluruh nelayan di Indonesia, sekitar 99,9% merupakan perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal motor yang berukuran di bawah 5 GT. Hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia pada tahun 2006 mencapai hampir 49 juta unit. Dari angka tersebut 13% saja yang mampu mengakses perbankan, sedangkan 49,87% mengandalkan modal sendiri.

Persoalan yang dihadapi masyarakat terhadap pemberian pinjaman, adalah kepercayaan lembaga-lembaga keuangan seperti bank kepada masyarakat kecil sangat rendah, karena selama ini fasilitas pinjaman pada lembaga keuangan

seperti bank hanya dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas, dan juga banyak fakta terjadi kegagalan pengembalian pinjaman yang dikucurkan bagi masyarakat kecil, oleh karena itu, pembinaan adalah kata kunci, membangun keberdayaan masyarakat adalah cara satu-satunya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat.

Somodiningrat (1999) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan memiliki dua kecenderungan yaitu kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecenderungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi berdaya. Kecenderungan sekunder merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menetapkan apa yang menjadi pilihan mereka.

Tabel 10 Bobot dan prioritas strategi peningkatan produktivitas nelayan Desa Kusu Lovra Kabupaten Halmahera Utara

<b>Strategi</b>	<b>Bobot</b>	<b>Prioritas</b>
Kredit pemilikan kapal bagi buruh nelayan	0,738	<b>P1</b>
Membuka tabungan khusus untuk buruh nelayan	0,170	<b>P2</b>
Peran lembaga keuangan mikro dan koperasi nelayan	0,092	<b>P3</b>

Diolah dari hasil A'WOT

Program-program prioritas dalam upaya peningkatan produktivitas nelayan antara lain: kredit pemilikan kapal bagi buruh nelayan, membuka tabungan khusus untuk buruh nelayan, dan oprimalisasi fungsi dan peran lembaga keuangan mikro dan koperasi nelayan. Hasil analisis A'WOT menunjukkan bahwa pemberian kredit pemilikan kapal bagi buruh nelayan merupakan prioritas program dalam upaya pemberdayaan nelayan Desa Kusu Lovra dengan nilai bobot 0,738, kemudian membuka tabungan khusus untuk buruh nelayan pada prioritas kedua dengan nilai bobot 0,170 dan priorias ketiga adalah oprimalisasi fungsi dan peran lembaga keuangan mikro dan koperasi nelayan pada urutan ketiga dengan nilai bobot 0,092. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel 10.



Secara umum, jumlah pendapatan nelayan Desa Kusu Lovra masih lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Diketahui bahwa pendapatan rata-rata nelayan Desa Kusu Lovra sebesar Rp852.941 perbulan, sedangkan pengeluaran sebesar Rp673.303 perbulan sehingga masih terdapat selisih pendapatan sebesar Rp179.638 per bulan. Meskipun masih terdapat selisih pendapatan, tidak semua nelayan memiliki tabungan di bank maupun di lembaga keuangan mikro yang ada di lingkungan sekitarnya. Selisih pendapatan tersebut oleh masyarakat nelayan dikumpulkan dan disimpan di rumah. Oleh karena itu, agar selisih pendapatan tersebut memiliki nilai tambah yang optimal, maka program utama yang perlu dilaksanakan adalah memberikan kredit khususnya kepada para buruh nelayan agar mereka memiliki kapal sendiri. Sehingga selisih pendapatan tersebut dapat digunakan untuk mengansur pembayarannya.

Selain itu, pilihan kebijakan lainnya adalah memberikan penyuluhan dan penyadaran kepada para nelayan agar mau membuka rekening tabungan, agar selisih pendapatan tersebut lebih aman dan dapat memberikan keuntungan dalam bentuk bunga terhadap masyarakat nelayan. Dengan demikian, diharapkan produktivitas nelayan bisa meningkat.

#### **(4) Peningkatan Peran Kelembagaan Lokal**

Dalam upaya untuk meningkatkan peran kelembagaan lokal, maka terdapat dua prioritas program yang dilaksanakan yaitu membentuk kelompok usaha bersama bagi istri nelayan, dan kedua adalah memberikan pelatihan diversifikasi usaha pengolahan ikan. Dari kedua prioritas program tersebut, memberikan pelatihan diversifikasi usaha pengolahan ikan memiliki nilai bobot yang paling tinggi yaitu sebesar 0,833 sedangkan prioritas program membentuk kelompok usaha bersama bagi istri nelayan merupakan prioritas kedua dengan nilai bobot sebesar 0,167. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel 11.

Kegiatan usaha ekonomi di Desa Kusu Lovra hingga saat ini masih dilakukan secara individu, belum ada kelompok usaha bersama yang lahir dari masyarakat nelayan sendiri. Hubungan kerja yang terjadi saat ini adalah hubungan antara atasan dengan bawahan atau pemilik perahu dengan buruh nelayan yang dengan sistem bagi hasil. Penghasilan yang diperoleh ketika buruh nelayan

melaut, ketika buruh nelayan tidak melaut maka pemilik perahu juga ikut tidak mendapatkan penghasilan.

Tabel 11 Bobot Dan Prioritas Strategi Peningkatan Peran Kelembagaan Lokal Desa Kusu Lovra Kabupaten Halmahera Utara

<b>Strategi</b>	<b>Bobot</b>	<b>Prioritas</b>
Membentuk kelompok usaha bersama bagi istri nelayan	0,167	<b>P2</b>
Memberikan pelatihan diversifikasi usaha pengolahan ikan	0,833	<b>P1</b>

Diolah dari hasil A'WOT

Hasil analisa A'WOT, membentuk kelompok usaha bersama bagi istri nelayan merupakan prioritas kedua dengan nilai bobot 0,229. Membentuk kelompok usaha bersama bagi istri nelayan merupakan upaya yang paling realistis bagi istri-istri nelayan yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Melakukan usaha bersama merupakan pekerjaan untuk membantu menambah penghasilan keluarga nelayan. Akan tetapi, pekerjaan mengurus keluarga tetap menjadi prioritas utama dalam rumah tangga. Kegiatan usaha yang bisa dilakukan secara berkelompok antara lain mengolah panganan dengan bahan dasar ikan.

Oleh karena itu, dari hasil analisa A'WOT diketahui bahwa yang menjadi prioritas pertama adalah memberikan pelatihan diversifikasi usaha pengolahan ikan dengan nilai bobot 0,833 dan memberikan pelatihan kepada para anggota kelompok merupakan pemberian modal yang sangat penting dalam melakukan kegiatan usaha. Sebab modal dalam melakukan usaha tidak hanya dalam bentuk uang semata, tetapi harus diberikan keterampilan mengenai jenis usaha yang akan mereka lakukan. Tanpa adanya keterampilan dari masing-masing anggota kelompok, maka kegiatan usaha yang akan dilakukan menjadi sia-sia.

Adapun jenis pelatihan yang akan diberikan sangat tergantung pada minat dari masing-masing anggota dan ketersediaan sumberdaya alam yang ada disekitar tempat tinggal mereka. Sebagai contoh, jika mereka tinggal di daerah pesisir, maka pelatihan keterampilan yang sesuai diberikan adalah pelatihan pengolahan ikan menjadi barang yang memiliki nilai tambah, seperti membuat ikan asap, mengolah ikan asin, atau membuat bandeng ikan dari hasil tangkapan nelayan setempat.

## (5) Konservasi Sumberdaya Ikan

Dalam upaya konservasi sumberdaya ikan, terdapat empat alternatif strategi pemberdayaan nelayan di Desa Kusu Lovra, komponen-komponen tersebut antara lain: 1) pembangunan pos jaga; 2) melakukan patroli rutin; 3) menambah armada patrol pengamanan laut dan 4) melarang penangkapan ikan dengan bahan peledak. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa alternatif program yang paling prioritas adalah pembangunan pos jaga dengan nilai poin 0,481. Alternatif program ini memiliki nilai bobot paling tinggi dalam penentuan strategi kebijakan konservasi sumberdaya ikan di sekitar daerah *fishing ground* nelayan Desa Kusu Lovra. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Matrik alternatif program konservasi sumberdaya ikan di Desa Kusu Lovra Kabupaten Halmahera Utara

<b>Faktor SWOT</b>	<b>Bobot</b>	<b>Prioritas</b>
Pembangunan pos jaga	0,481	<b>P1</b>
Melakukan patroli rutin	0,103	<b>P4</b>
Menambah armada patroli pengamanan laut	0,297	<b>P2</b>
Melarang penangkapan ikan dengan bahan peledak	0,119	<b>P3</b>

Diolah dari hasil A'WOT

Tabel 12 menunjukkan bahwa dalam program konservasi sumberdaya ikan, alternatif program yang paling prioritas adalah pembangunan pos jaga yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencurian ikan, ataupun penangkapan ikan dengan cara destruktif.

## 4 KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

- 1) Nelayan Desa Kusu Lovra terbagi menjadi dua yaitu nelayan katinting dan buruh nelayan katinting, sumber pendapatannya tidak hanya dari hasil melaut, tetapi sebagian dari mereka memiliki kebun kelapa sebagai sumber penghasilan tambahan.
- 2) Rata-rata pendapatan dari sektor pertanian sebesar Rp300.000 sampai Rp500.000 per panen dari lahan seluas 1 sampai 2 hektar, sedangkan

pendapatan nelayan maupun buruh nelayan dari hasil melaut rata-rata sebesar Rp2.450.000 per bulan.

- 3) Faktor internal yang dominan sebagai penghambat program pemberdayaan masyarakat Desa Kusu Lovra antara lain keterampilan dan penguasaan teknologi masih kurang. Faktor eksternal yang dominan sebagai penghambat program pemberdayaan adalah kerusakan ekosistem laut akibat penangkapan destruktif.
- 4) Strategi pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Kusu Lovra diprioritaskan pada (1) peningkatan produktivitas nelayan; (2) peningkatan peran kelembagaan lokal dan (3) konservasi sumberdaya ikan.

#### **4.2 Saran**

Dengan demikian dapat disarankan sebagai berikut:

- 1) Pelarangan penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan, diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk menertibkan tata niaga bahan baku pembuatan bom, serta mengawasi penggunaannya.
- 2) Instansi terkait perlu mensosialisasikan jenis-jenis dan cara penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan kepada para nelayan.
- 3) Pemberian bantuan kepada nelayan perlu ditingkatkan, khususnya peralatan dan perlengkapan tangkapan nelayan yang lebih modern dan ramah lingkungan.
- 4) Kesadaran nelayan atas dampak yang ditimbulkan dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak perlu diimbangi dengan melibatkan mereka dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya.

## **5 DAFTAR PUSTAKA**

- Chambers Robert. 1995. *Overty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* Uner Kirdar and Leonard Silk. (eds), *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Charles B. Purba, Haluan J, Simbolon D, Wisudo S H. 2008. Model Pengembangan Kemitraan Usaha Perikanan Tangkap dengan Lembaga Keuangan di Kabupaten Indra Mayu. *Bulletin PSP*. Vol XVII. No. 3 Desember 2008. Hal 298.

- Dahuri R. 2000. *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: LISPI.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Utara. 2008. *Rencana Induk Pengembangan Wilayah Pesisir Kabupaten Halmahera Utara*. Halmahera Utara: DKP Kabupaten Halmahera Utara. 5:1-21.
- Mintaroem K, Farisi MF. 2008. *Aspek Sosial-Budaya pada Kehidupan Ekonomi Masyarakat Nelayan Tradisional (Studi pada Masyarakat Nelayan Tradisional di Desa Bandaran, Pamekasan)*. Universitas Terbuka.
- Raharjo Y. 1996. *Community Base Management di Wilayah Pesisir Indonesia*. Makalah pelatihan ICZPM. PKSPL-IPB dan Ditjen Bangda Depdagri.
- Saaty L.T., 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Sajogyo. P. 1977. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Soekartawi. 1986. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Rajawali.
- Soesilowati E. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat Lapisan Bawah. Kasus Kegiatan Suatu LSM di Jawa Tengah [Tesis]*. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.
- Somodiningrat G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat JPS*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyanto dan Subejo. "Harmonisasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan Pembangunan Berkelanjutan". Artikel diterbitkan dalam Buletin Ekstensia-Pusat Penyuluhan Pertanian Deptan RI Vol 19/Th XI/2004.